

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Orde Baru lahir dari tekad untuk melakukan koreksi total atas kekurangan sistem politik yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan kebulatan tekad atau komitmen dari segala kekurangan pada masa sebelumnya, Orde Baru merumuskan tujuannya secara jelas yakni melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagaimana diungkapkan oleh Soeharto dalam salah satu pidatonya

“Koreksi secara mendasar terhadap kekeliruan masa lampau itulah yang melahirkan Orde Baru. Ialah, tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Sejarah lahirnya Orde Baru ini harus kita camkan sedalam-dalamnya dalam lubuk hati dan kesadaran kita semua tanpa kecuali” (Departemen Pertanian, 1994:6)

Sejak permulaan Pemerintahan Orde Baru tahun 1966, yang sejalan dengan pergeseran pusat perhatian dari masalah pembinaan bangsa ke masalah pembangunan ekonomi, muncul perhatian yang serius untuk menata kembali suatu sistem politik yang diharapkan akan dapat menunjang kegiatan pembangunan ekonomi tersebut (Manuel Kaisiepo, 1987: 14).

Dalam membangun sistem politik yang dapat menjamin stabilitas sebagai prasyarat pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan sebagaimana tercermin dalam pembangunan Nasional Jangka Panjang Pertama mulai dilakukan juga serangkaian usaha untuk menyetatkan kembali birokrasi pemerintahan sebagai instrumen penting yang akan menopang dan mempelancar usaha-usaha pembangunan (ekonomi) tersebut. Ini berarti usaha

menciptakan suatu sistem birokrasi modern yang efisien dan efektif (Mohtar Mas'ood, 1989:7).

Rezim Orde Baru dibangun dengan dukungan penuh dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu, baik kekacauan politik, ekonomi, maupun budaya pada masa Orde Lama dengan Soekarno sebagai presiden.

“Pembangunan pemerintah pada awal Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah” (Ali Moertopo, 2009:48).

Pemerintahan Orde Baru adalah suatu penataan kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal koreksi terhadap penyelewengan pada masa yang lalu. Orde Baru bisa diartikan sebagai orde yang mempunyai sikap dan tekad mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat serta mengabdikan kepada kepentingan nasional yang didasari oleh falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi asas serta sendi Undang-undang Dasar 1945. “Orde Baru juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang tertib dan negara yang berdasarkan hukum, dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta warga negara mempunyai pemimpin atau penguasa yang tunduk kepada ketentuan yang berlaku” (Jenderal Soeharto, 1967:7).

“Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar itulah yg menjadi titik awal lahirnya Orde Baru” sebab dengan Supersemar itulah kemudian Soeharto membubarkan PKI dan mengambil tindakan-tindakan pembaharuan dan stabilisasi politik. Dan dengan Supersemar itulah sebenarnya kekuasaan Soekarno dengan sistem politik Demokrasi Terpimpin menjadi lenyap. Lenyapnya kekuasaan Soekarno kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS yang melalui sidang istimewa pada tahun 1967 mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat

Presiden, sehingga sebagai simbol pun Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian pada bulan Maret 1968 MPRS mengangkat dan melantik Letjen Soeharto sebagai Presiden (Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984: 415).

Pengertian, ciri-ciri, dan hakekat Orde Baru sebagai yang dirumuskan oleh seminar II Angkatan Darat pada bulan Agustus 1966 adalah:

“Orde Baru menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang menegembangkan kultur individu. Akan tetapi, Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan. Orde Baru menghendaki pengutamakan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dan cita-cita demokrasi ekonomi. Orde Baru adalah suatu tata kehidupan baru disegala bidang yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945” (Nugroho Notosusanto, 1985: 31).

Keterlibatan militer dalam penyusunan agenda Orde Baru yang memang untuk menyiapkan militer memimpin rezim ini, berimbas besar terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat sepanjang masa Orde Baru. Militer dilibatkan dalam setiap institusi yang dibangun Orde Baru untuk menunjang dan menjalankan kekuasaannya. Terutama dalam bidang politik dan ekonomi, militer menjadi peran utama. (Eddy Budiarmo, 2000:2-3).

Untuk menyingkirkan sisa-sisa pengaruh Soekarno dan unsur PKI dalam pemerintahan, maka usaha yang dilakukan Orde Baru adalah mengamankan agenda Politik Pemilu yang direncanakan pada tahun 1968 dari partai-partai lama yang diduga masih tersimpan sisa-sisa pengaruh Soekarno. Dari sini muncullah konsep perombakan struktur politik oleh Ali Moertopo yang dikenal dengan istilah “Strategi Politik Nasional”.

Dalam bukunya Strategi Politik Nasional, Ali Moertopo menulis:

“Bahwa penataan kehidupan politik yang dirancang pada awal Orde Baru diarahkan agar secepat mungkin dapat dicapai stabilisasi kehidupan politik dan penyederhanaan

struktur kepartaian, introduksi pengangkatan dalam anggota DPR dan MPR, dan format Pemilu berikut 12 item consensus tentang itu yang dicapai antara kekuatan-kekuatan politik sipil dari partai, kalangan ABRI (TNI-AD), dan pemerintah dibuat dalam rangka mendukung ide stabilisasi politik dan ekonomi tersebut” (Ali Moertopo, 1974:22).

Angkatan Darat Indonesia berbeda dengan kebanyakan angkatan darat pada umumnya yang telah merebut kekuasaan politik, karena tidak pernah sebelumnya menganggap diri sebagai suatu organisasi yang tidak berpolitik. Dari awal sejarahnya dalam tahun 1945 sebagai tentara gerilya yang memerangi kembalinya kekuasaan penjajah Belanda sampai konsolidasi kekuasaan politiknya di bawah Orde Baru. Dengan keikutsertaan sepenuhnya dalam perjuangan nasional melawan kekuasaan belanda itu, kebanyakan perwira tersebut merasa bahwa suara mereka harus didengar dalam urusan politik di masa sesudah kemerdekaan. Sesudah berlaku undang-undang keadaan perang tahun 1957, hak peran serta mereka itu diberi pengakuan resmi melalui pengangkatan-pengangkatan dalam kabinet, parlemen dan administrasi. Semasa zaman Demokrasi Terpimpin, Angkatan Darat menjadi salah satu dari dua kekuatan politik penting yang terorganisasi, dan bersama dengan Presiden Soekarno menguasai politik dewasa itu. Akhirnya pembersihan angkatan Darat terhadap PKI tahun 1965 dan keberhasilannya dalam menurunkan Presiden Soekarno dari kedudukannya, menjadikan Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan satu-satunya di atas punggung politik Indonesia (Harold Crouch, 1986 :389).

Dwifungsi ABRI menjadi dasar legitimasi bagi peran sosial politik ABRI dimana “Cikal-Bakal dari pemikiran itu ialah konsepsi Nasution tentang Jalan Tengah ABRI pada 1985, yang intinya pemberian kesempatan kepada ABRI, sebagai salah satu kekuatan politik bangsa, untuk berperan serta di dalam pemerintahan atau dasar Asas Negara Kekeluargaan” (Samego, 1998:59). Atas dasar konsepsi tersebut Dwifungsi ABRI memberikan pembenaran bagi ABRI tidak hanya berperan di bidang hankam tetapi juga dibidang sosial politik.

Kedua peran ABRI yakni peran di bidang hankam dan bidang sosial politik juga disebut sebagai fungsi-fungsi ABRI, oleh sebab itu ABRI menjalankan kedua fungsinya secara bersamaan sehingga ABRI tidak saja menjalankan fungsi hankam tetapi juga sosial politik yang memberikan peluang bagi anggota ABRI untuk memangku jabatan sipil tanpa meninggalkan statusnya sebagai anggota ABRI. Dan menurut pemahan Orde baru mengenai Dwifungsi ABRI yaitu keikutsertaan ABRI dalam politik penyelenggaraan kekuasaan negara, yang lahir pada masa perang kemerdekaan. Dari segi historis tersebut ABRI merasa memiliki kewajiban dalam mempertahankan dan menjaga Indonesia dengan ikut serta berperan disegala bidang kehidupan. Dimana fungsi non-hankam ABRI ini lebih dikenal dengan peran sosial politik ABRI.

Pada awal Orde Baru keterlibatan militer secara aktif bertujuan untuk memulihkan krisis nasional yang terjadi akibat pemberontakan G30-S/PKI karena pada saat itu kondisi atau situasi politik di Indonesia tidak menentu dan terjadi krisis ekonomi, sehingga militer turut serta dalam usaha mempertahankan dan mengisi pembangunan bangsa. Kemudian keterlibatan militer pun ikut menentukan status kepengurusan dalam organisasi kemasyarakatan maupun sosial politik pada masa Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde Baru keterlibatan militer tidak hanya mendominasi peran sosial politik saja juga dibidang ekonomi. Dengan tujuan agar dapat menjamin mengalirnya dana yang tetap ke kas Angkatan Darat, sehingga banyak perwira AD yang ditugaskan di berbagai sektor ekonomi, seperti perusahaan minyak negara yaitu Pertamina yang merupakan salah satu BUMN yang dipakai AD untuk mengisi kas mereka dan perusahaan lainnya yaitu Bulog (Badan Urusan Logistik). Sehingga keterlibatan militer dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial politik dalam upaya membangun bangsa bukan untuk memperoleh jabatan diluar bidangnya atau jabatan sipil (Indria Samego, 1998:59).

1.2 Analisis Masalah

6

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto di Bidang Sosial Politik Pada Masa Awal Orde Baru.
2. Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto di Bidang Birokrasi Pada Masa Awal Orde Baru.
3. Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto di Bidang Ekonomi Pada Masa Awal Orde Baru.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada “Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto di Bidang Birokrasi Pada Masa Awal Orde Baru.

1.2.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto di Bidang Birokrasi Pada Masa Awal Orde Baru” ?

1.3 Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

7

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto di Bidang Birokrasi pada masa Awal Orde Baru.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, para pembaca maupun pihak lainnya, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan dan tambahan informasi tentang adanya Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto di Bidang Birokrasi pada masa Awal Orde Baru.
2. Bagi mahasiswa sejarah, ini merupakan sebuah wawasan sejarah lokal yang diharapkan sebagai pelajaran yang bisa di ambil untuk masa yang akan datang.

1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian : Keterlibatan Militer
2. Objek Penelitian : Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto
Di Bidang Birokrasi Pada Masa Awal Orde Baru
3. Tempat penelitian : Perpustakaan Daerah Lampung
4. Waktu penelitian : 2013
5. Bidang ilmu : Ilmu Sejarah (Sejarah Militer)

REFERENSI

- Departemen Pertanian. 1994. *Presiden Soeharto dan Pembangunan Pertanian*. PT. Citra Media Persada, Jakarta. Halaman 6
- Kaisiepo Manuel. 1987. Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jurnal Umum Politik 2. PT. Gramedia. Jakarta. Halaman 14
- Mohtar Mas' oed. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, LP3ES. Jakarta. Halaman 7
- Ali Moertopo. 2004. *Strategi Pembangunan Nasional Dalam Eka Nova Prasetya Pinem. Kebijakan Politik Fusi : Suatu Tujuan Politik Kepartaian Rezim Orde Baru*, FISIP, Universitas Sumatera Utara. Halaman 48
- Jenderal Soeharto. 1967. *Orde Baru (Kutipan dari Pidato Pejabat Presiden Soeharto pada Sidang Paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967)*. Grip. Surabaya. Halaman 7
- Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Depdikbud dan PN, Balai Pustaka. Jakarta. Halaman 415
- Nugroho Notosusanto. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, dalam: Pancasila Ideologi dan dasar Negara RI, Dep-pen. Halaman 31
- Eddy Budiarmo. 2000. *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa 77/78*. Grasindo. Jakarta. halaman 2-3
- Ali Moertopo. 1974. *Strategi Politik Nasional, Center For Strategi Ard International Studies*. Jakarta. Halaman 22
- Harol Crouch. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. Halaman 389
- Indria Samego. 1998. *Bila ABRI Menghendaki : Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Mirzan. Bandung. Halaman 59